



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti memerlukan penelitian terdahulu yang mana topik yang diangkat untuk diteliti, sudah pernah diteliti oleh orang lain sehingga nantinya peneliti bisa mengambil celah untuk dijadikan penelitian yang baru. Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan acuan sehingga nantinya peneliti akan dipermudah saat melakukan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai tolok ukur serta perbandingan untuk menganalisis sebuah teori, konsep, kesimpulan, serta menganalisis kelemahan dan kelebihan dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan.

Dalam melakukan penelitian tentang analisis isi kuantitatif pemberitaan potensi gempa tsunami di Selatan Jawa pada media *online* lokal Banten selama periode tahun 2020-2021, peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dan bisa dijadikan sebagai pembanding sekaligus sumber referensi.

Penelitian pertama berjudul “Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi, dan Kerjasama)” yang diteliti oleh Setio Budi HH, seorang dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2012. Jurnal penelitian ini membahas tentang problematika yang masih muncul dalam penanganan bencana dilihat dari perspektif komunikasi. Penelitian

yang berbasis literatur ini bertujuan untuk melihat manajemen bencana yang ada di Indonesia dilihat dari isu komunikasi yang sering terjadi ketika terjadi bencana.

Dalam hal ini, Setio Budi menggunakan menggunakan dua konsep dan pembahasannya berfokus pada kedua konsep tersebut yakni sistem pendekatan manajemen bencana dan siklus manajemen bencana. Konsep manajemen bencana dikemukakan oleh Coppola dan Maloney (2009) dan mencakup empat aspek utama antara lain *mitigation, preparedness, response, dan recovery*. Namun, keempat aspek tersebut tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada *stakeholder* yang memiliki tugas masing-masing pada keempat aspek tersebut. Lalu, pada konsep yang kedua yakni siklus manajemen bencana, konsep tersebut dikemukakan oleh Shaw dan Gupta (2009), yang mana di antaranya terdapat empat siklus pula, yakni *before disaster, during disaster, after disaster, dan non-disaster*.

Namun berdasarkan keempat aspek tersebut, Setio Budi lebih menyoroti isu-isu komunikasi yang terjadi selama siklus tersebut. Dalam penelitian ini, ia juga menekankan bahwa ketika memberitakan isu kebencanaan, media perlu memahami karakteristik khalayak untuk memastikan pesan yang disampaikan karena hal tersebut berpotensi mendorong ke tindakan dan perilaku dalam tahap mitigasi bencana. Setio Budi menyimpulkan perlu adanya upaya sinergis dan integrasi dari berbagai lembaga yang ditugaskan untuk menangani bencana. Sehingga, dengan kerjasama yang baik, semua pihak akan mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, terutama media massa.

Kelemahan Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai penggambaran fenomena awal terkait permasalahan yang terjadi

dalam komunikasi bencana, sekaligus sebagai acuan awal terkait permasalahan aspek kebencanaan dalam lingkup komunikasi dan media massa.

Penelitian kedua berjudul *Disasters in the media: A content analysis of the March 2011 Japan earthquake/tsunami and nuclear disasters*. Penelitian ini merupakan tesis yang diteliti oleh Danielle R Stomberg pada tahun 2012. Seperti judulnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi berita-berita tentang bencana gempa, tsunami, dan nuklir yang terjadi di Jepang yang diterbitkan oleh media-media dari negara yang berbeda.

Stomberg menggunakan pemberitaan di media *online* dari *NYTimes.com* (untuk mewakili media dari Amerika Serikat) dan *Yomiuri Shimbun* (untuk mewakili media Jepang). Kedua media ini digunakan sebagai objek analisis untuk memberikan penggambaran atas penggunaan mitos bencana, bencana masa lalu, *hype* media, serta sumber-sumber yang dikutip dalam pemberitaan tentang bencana yang terjadi di Jepang secara komparatif. Sehingga, dalam penelitian ini Stomberg menganalisis isi berita secara kuantitatif dengan total 261 artikel berita dari *NYTimes.com*, dan 276 artikel berita dari *Yomiuri Shimbun*.

Stomberg menggunakan empat konsep utama dalam penelitian ini, di antaranya *Agenda Setting*, *The Framing of News*, *Phenomenon of Media Hype*, serta *Culture's Influence on News*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti *hype* media terhadap topik krisis nuklir di kedua media yang dianalisis selama periode waktu yang ditentukan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa hanya ada sedikit mitos bencana yang digunakan secara keseluruhan, selain itu terdapat sejumlah mitos yang akhirnya membuat khalayak panik dalam kedua media yang

diteliti. Namun, hasil yang paling terlihat perbedaannya secara signifikan adalah terdapat perbedaan dalam penggunaan sumber dari kedua media *online* tersebut.

Relevansi penelitian Stomberg (2012) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah persamaan topik, serta metode dan pendekatan penelitian sehingga peneliti bisa menemukan banyak referensi dari penelitian yang ini yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan terkait analisis pemberitaan potensi gempa dan tsunami di wilayah Selatan Jawa selama periode tahun 2020-2021 di media-media *online* lokal Banten.

Penelitian ketiga berjudul *Analysis of Online News Coverage on Earthquakes Through Text Mining* yang dilakukan oleh Camilleri et al. pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh jurnal *Frontiers in Earth Science*. Dalam penelitian ini Camilleri et al. menggunakan 23 media di seluruh dunia yang memberitakan tentang bencana dari periode 10 Januari 2018-10 Januari 2019 sebagai objek penelitian. Karena periode yang cukup panjang dan objek penelitian yang sangat luas, Camilleri et al. mengumpulkan seluruh populasi yang diteliti secara otomatis menggunakan metode *text mining* secara digital menggunakan *prototype* bernama QuakeNews Analyser yang memang diprogram secara otomatis untuk mengunduh pemberitaan yang terbit di seluruh media yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu, mereka menggunakan kata-kata kunci untuk mendapatkan berita tentang gempa yang dimaksud. Totalnya, mereka mendapatkan 268.182 berita yang dianalisis, dan teridentifikasi sebanyak 698 gempa bumi yang terjadi selama periode tersebut. Dalam hal ini mereka melakukan pemetaan terhadap berita-berita tersebut berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan dan juga dikorelasikan dengan

seberapa besar magnitudo gempa yang terjadi dalam suatu wilayah. Selain itu, mereka juga memetakan pemberitaannya berdasarkan wilayah terjadinya gempa dan seberapa sering frekuensi munculnya pemberitaan berdasarkan kejadian gempa tersebut.

Hasilnya menunjukkan bahwa berita-berita yang dihasilkan dari 23 media tersebut mengacu pada besarnya magnitudo gempa. Jika magnitudo gempa lebih dari 7, maka pemberitaan tentang gempanya diperkirakan akan mencapai 240 berita dari keseluruhan media tersebut. Sehingga, secara sederhana dapat terlihat adanya hubungan antara magnitudo gempa dan banyaknya pemberitaan yang dihasilkan. Lalu, berdasarkan pemetaan bencana gempa yang terjadi di seluruh dunia selama periode 2018-2019, Jepang berada di urutan pertama negara yang paling sering mengalami bencana gempa, yakni sebanyak 282 gempa, dan Indonesia berada di urutan kedua, yakni sebanyak 155 gempa. Dalam analisis tersebut Camilleri et al. juga menemukan fakta bahwa semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka semakin sering pula media-media mengangkat topik tersebut menjadi sebuah berita.

Relevansi penelitian ini bagi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai rujukan penelitian karena sama-sama bersifat memetakan pemberitaan bencana yang terdapat di berbagai media. Namun kelemahannya, penelitian ini hanya memberikan gambaran awal terkait besar kecilnya magnitudo gempa yang terjadi di sebuah wilayah, dan diukur melalui parameter jumlah berita yang dihasilkan berdasarkan magnitudo tersebut.

Penelitian yang terakhir berjudul *Agenda Setting* Penyebaran Hoaks di Media Sosial yang diteliti oleh Christiany Juditha pada tahun 2019 yang diterbitkan

dalam Jurnal Penelitian Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran tentang *agenda setting* dalam penyebaran hoaks di media sosial, khususnya dalam memetakan isu-isunya. Dalam hal ini, Juditha menggunakan hasil temuan hoaks selama tujuh bulan, yakni Agustus 2018 hingga Februari 2019 oleh tim *Automatic Identifications Systems* (AIS) Kemenkominfo dari media sosial yang meliputi Facebook, Twitter, YouTube, Google, LINE, dan BBM) sebagai populasi yang akan diteliti. Keseluruhan populasi tersebut diperoleh Juditha dengan cara mengambil data-data tersebut berdasarkan laporan temuan yang dirilis oleh tim AIS Kemenkominfo dan unit analisis yang menjadi fokus risetnya adalah seluruh isu hoaks berbagai topik dari hasil laporan tersebut. Dari data tersebut, terdapat 771 hoaks yang berhasil teridentifikasi dan Juditha menganalisis keseluruhan hoaks tersebut dalam penelitian ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tiga tema isu hoaks yang paling menonjol bagi warganet di Indonesia, yakni politik, kesehatan, dan juga isu pemerintahan. Hal ini dikarenakan saat itu tema politik sangat digencarkan bersamaan dengan persoalan Pilpres 2019. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa agenda media sosial terhadap hoaks ini dibentuk oleh para pengguna media sosial sehingga dianggap penting juga bagi khalayak lainnya di media sosial. Hal ini masih ada kaitannya dengan konsep *agenda setting* media konvensional yang didefinisikan oleh McCombs and Shaw (1972) bahwa apa yang dianggap penting oleh media, itu pula yang dianggap penting oleh khalayak.

Juditha menjelaskan bahwa dalam konteks internet dan media sosial, media tidak lagi menjadi *gatekeeper*, melainkan menjadi *gateway* karena internet tak

hanya memperluas cakupan dinamika *agenda setting*, tetapi juga memperluas definisi sumber berita dan redaksi pemberitaan di dalam proses komunikasi massa (Bode et al., 2010 dalam Juditha, 2019).

Relevansi penelitian ini bagi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai penelitian paling baru yang menggunakan teori *agenda setting* dan sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Sehingga, penelitian ini bisa menjadi landasan bahwa teori *agenda setting* khususnya agenda media merupakan teori yang memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian dengan metode analisis isi kuantitatif yang bisa digunakan untuk penelitian dalam topik apapun. Dalam arti lain menunjukkan bahwa meski penelitian tersebut meneliti tentang hoaks di media sosial, tetapi teori tersebut masih relevan jika peneliti gunakan untuk menganalisis isu bencana atau jurnalisme bencana.

Agar bisa mendapatkan gambaran secara ringkas, peneliti telah mengolah keempat penelitian terdahulu ke dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

<b>Judul Penelitian</b>	Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi, dan Kerjasama)	<i>Disasters in the media: A content analysis of the March 2011 Japan earthquake/tsunami and nuclear disasters</i>	<i>Analysis of Online News Coverage on Earthquakes Through Text Mining</i>	<i>Agenda Setting</i> Penyebaran Hoaks di Media Sosial
<b>Nama Peneliti</b>	Setio Budi HH	Danielle R. Stomberg	Camilleri et al.	Christiany Juditha
<b>Rumusan Masalah</b>	Mengapa masih banyak problematika yang muncul	Apakah budaya memengaruhi pembingkaihan ( <i>framing</i> ) dalam	Apakah terdapat keterkaitan antara besarnya magnitudo gempa	Bagaimana gambaran terkait <i>agenda setting</i>

	dalam penanganan bencana?	pemberitaan bencana?	terhadap jumlah pemberitaan di media <i>online</i> ?	penyebaran hoaks di media sosial?
<b>Tujuan Penelitian</b>	Mengkaji lebih lanjut terkait manajemen bencana dalam aspek sistem komunikasi yang mencakup koordinasi, informasi dan kerjasama	Melihat perbedaan antara bentuk pemberitaan tentang bencana gempa dan tsunami Jepang di media Amerika dan Jepang dilihat dari sudut pandang budaya, <i>media hype</i> , <i>gatekeeping</i> serta <i>framing</i> ?	Melihat apakah ada keterkaitan antara magnitudo gempa dengan jumlah berita <i>online</i> dan mengurangi potensi bias dari laporan berita <i>online</i> yang timbul dari sejumlah sumber yang digunakan dalam liputan bencana.	Mendapatkan gambaran tentang <i>agenda setting</i> penyebaran hoaks di media sosial
<b>Metode Penelitian</b>	Studi literatur kualitatif	Analisis isi kuantitatif	Analisis isi kuantitatif	Analisis isi kuantitatif
<b>Teori dan konsep</b>	Manajemen bencana	a. <i>Agenda Setting</i> b. <i>Framing</i> c. <i>Media hype</i> d. Pengaruh budaya dalam berita	-	Teori <i>agenda setting</i>
<b>Hasil Penelitian</b>	Dalam peristiwa bencana, segala aspek koordinasi serta sistem manajemen bencana harus diimplementasikan karena merupakan strategi yang efektif dalam upaya penanggulangan dan penanganan bencana.	Hasil yang paling terlihat perbedaannya secara signifikan adalah terdapat perbedaan dalam penggunaan sumber dari kedua media <i>online</i> tersebut, yakni <i>NYTimes.com</i> menggunakan rata-rata 4,57 sumber sedangkan <i>Yomiuri Shimbun</i> hanya menggunakan 3,20 sumber.	Terdapat hubungan antara seberapa besar magnitudo gempa terhadap jumlah pemberitaan di media <i>online</i> seluruh dunia. Sehingga, semakin besar magnitudonya, semakin sering pemberitaan gempa tersebut akan muncul.	Terdapat tiga tema isu hoaks yang paling menonjo bagi warganet di Indonesia, yakni politik, kesehatan, dan juga isu pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa agenda media sosial terhadap hoaks ini dibentuk sepenuhnya oleh para pengguna media sosial

				sehingga dianggap penting juga bagi khalayak lainnya di media sosial.
<b>Relevansi Penelitian</b>	Sebagai rujukan awal dan sumber referensi terkait konsep jurnalisme bencana.	Sama-sama menggunakan teori <i>agenda setting</i> dan terdapat persamaan topik, serta metode dan pendekatan penelitian sehingga peneliti bisa menemukan banyak referensi dari penelitian yang ini yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan	Dilihat dari metode penelitian dan objek yang diteliti, hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, kelemahannya, penelitian ini hanya berfokus pada pemetaan terkait seberapa sering berita diberitakan dikaitkan dengan besar magnitudo gempanya, dan tidak membahas secara detil terkait aspek manajemen bencananya.	Merupakan penelitian paling baru yang menggunakan teori <i>agenda setting</i> media dan sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

## 2.2 Teori dan Konsep

### 2.2.1 Jurnalisme Bencana

Jurnalisme bencana adalah sebuah *genre* baru dalam dunia jurnalistik yang sangat penting bagi media-media di Indonesia (Nazaruddin, 2007, p. 165). Kemunculan *genre* jurnalisme bencana ini muncul pada tahun 2000-an (Nazaruddin, 2015, p. 85). Dalam hal ini, Nazaruddin (2007 dalam Suwarno & Suryawati, 2019, p. 62) menyarankan media-media di Indonesia perlu mempelajari jurnalisme bencana dikarenakan empat alasan utama.

Yang pertama, Indonesia merupakan negeri yang rentan terkena bencana baik secara geologis maupun sosiologis; kedua, media massa akan selalu memberitakan setiap peristiwa bencana yang terjadi, baik dijadikan *headline* ataupun dalam mengisi waktu *prime time*; ketiga, masyarakat Indonesia akan selalu membutuhkan informasi tentang bencana dan bergantung pada informasi yang disajikan oleh media; dan yang terakhir, informasi terkait bencana selalu simpang siur dan seringkali menyesatkan, sehingga media massa berperan menjadi tumpuan informasi yang akurat.

Perlu diketahui, bahwa konsep jurnalisme bencana ini merupakan konsep seputar bagaimana seharusnya media dalam memberitakan isu bencana, tetapi bukan hanya berfokus pada penyajian informasi saat terjadinya, melainkan juga harus berfokus pada informasi yang berkaitan dengan pemulihan atau *recovery* dan juga mitigasi (Legowo, 2019, p. 32). Hal itulah yang dinamakan sebagai sistem manajemen bencana modern.

Manajemen bencana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan terbagi ke dalam empat komponen utama yang fungsional yakni *mitigation*, *preparedness*, *response*, dan *recovery*. Keempat komponen tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sistem Manajemen Bencana



Sumber: Budi HH (2012, p.366)

Simonovi'c (2011 dalam Budi HH, 2012, pp. 365-366) memberikan penjelasan dari keempat komponen tersebut, antara lain:

- a. Mitigasi (*mitigation*): Tahap ini merupakan tahap perencanaan jangka panjang dan termasuk identifikasi aspek kerentanan dari bagian-bagian di suatu wilayah, dan mengacu pada ancaman-bahaya, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil dalam meminimalisasi resiko dari bencana itu sendiri. Aspek ini mencakup unsur reduksi (minimalisasi) atau mengeliminasi komponen resiko bahaya dari bencana tersebut.
- b. Kesiapsiagaan (*preparedness*): bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa bencana yang akan terjadi, sehingga ada langkah-langkah yang bisa dirancang untuk mengatasi masalah-masalah terkait kebencanaan dan bisa mempersiapkan sumber daya yang sekiranya dibutuhkan

untuk melakukan respon yang efektif disiapkan sebelum terjadinya bencana.

- c. Respon (*response*): mencakup pembahasan tentang hunian darurat atau pengungsian, SAR, penanganan korban, asesmen kerusakan, dan pengukuran tingkat kedaruratan di suatu wilayah. Lalu, perlu ada pula pengantisipasi untuk mengatasi berbagai kebutuhan seperti koordinasi, komunikasi, serta asesmen situasi terus menerus tentang sumber daya yang diperlukan secara tepat sasaran.
- d. Pemulihan (*recovery*): tahap yang di dalamnya mencakup upaya terus menerus tentang rekonstruksi, restorasi, rehabilitasi, dan pembangunan kembali setelah terjadinya bencana.

Nazaruddin (2015, p. 80) menjelaskan bahwa bencana merupakan salah satu isu yang sudah pasti layak dimuat dan diberitakan di media karena bencana dianggap memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun, harus tetap ada kriteria atau nilai-nilai yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan ketika akan memberitakan isu bencana. Tradisi jurnalistik menganggap bahwa liputan terkait fenomena atau peristiwa bencana ini memiliki daya tarik bagi khalayak yang sangat tinggi. Selain itu, jurnalisme bencana juga memiliki fungsi memperingatkan dan membantu masyarakat dan pihak lain dalam penanggulangan bencana (Panuju, 2018, pp. 219-220).

Namun, yang sering menjadi permasalahan dalam jurnalisme bencana ini adalah belum banyak media yang menyadari perannya dalam

memberitakan isu-isu kebencanaan. Khususnya di Indonesia, banyak media yang masih mempraktikkan *over-generalisation* dan kecenderungan *framing* media terhadap pemberitaan tentang isu bencana (Nazaruddin, 2015, p. 84). Dalam produksi berita, perlu adanya enam unsur yang digunakan sebagai unsur pembangun berita dan kelengkapan berita. Hikmat (2018, p.151) menjabarkan keenam unsur tersebut menjadi unsur 5W1H yang terdiri dari *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Lalu, Ishwara (2011, pp. 82-84) membagi jenis berita menjadi tiga kategori, yakni *hard news, soft news, dan feature*. Pemberitaan dengan jenis *hard news* biasanya bertujuan untuk menyampaikan informasi yang hanya memuat apa yang ditemukan saat suatu peristiwa terjadi secara lugas, sehingga tipe berita *hard news* ini akan cocok jika diterapkan pada peristiwa besar yang baru saja terjadi seperti bencana gempa atau bahkan tsunami, sehingga jurnalis sebagai penulis berita bisa secepatnya melaporkan peristiwa tersebut kepada masyarakat. Lalu, terdapat tipe *soft news* yang digunakan untuk tujuan memberikan hal-hal menarik di luar peristiwa utama, untuk disajikan kepada audiens dengan susunan cerita yang lebih halus. Yang terakhir, *feature* merupakan berita yang sulit disampaikan secara singkat dan lugas, namun dari segi topik masih tetap faktual. Hanya saja *angle* pemberitaan yang diambil akan lebih mengarah pada unsur kemanusiaan.

Dari ketiga jenis berita tersebut, perlu perhatian dan pertimbangan secara serius jika ingin mengangkat isu yang ada kaitannya dengan bencana

yang terjadi. Hal ini dikarenakan setiap peristiwa bencana yang terjadi akan selalu diberitakan oleh media massa, dan masyarakat selalu bergantung pada pemberitaan dari media massa untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya terkait bencana yang baru saja atau sedang terjadi (Nazaruddin, 2007, p. 163).

Banyak jurnalis yang terjebak dalam 'keasyikan' untuk membesarkan peristiwa dengan selalu meliput dan memberitakan mengenai banyaknya korban karena pemberitaan tentang isu bencana ini hanya dianggap sebagai *magnitude* dalam sebuah nilai berita (Prajarto, 2008, p. 10). Banyak media pula yang berfokus pada bencana yang dimaknai sebagai peristiwa sensasional dengan nilai dramatis tinggi (Sukmono & Junaedi, 2018, p. 112). Hal ini dapat dikatakan sebagai praktik jurnalistik yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dampak psikologis terhadap publik yang mengalami bencana tersebut. Dalam kata lain, komunikasi bencana yang tak dilandasi rasa tanggung jawab sosial akan berpotensi menimbulkan bencana komunikasi (Susanto, 2011a dalam Panuju, 2018, p. 221).

Dalam praktik jurnalisme bencana, media diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dengan menghadirkan orang-orang yang kredibel untuk menjadi narasumber. Media juga diharapkan dapat memberikan berita-berita yang berkualitas dalam memberitakan peristiwa bencana. Dalam hal ini, kualitas berita di media dapat diukur melalui beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Mitchell V. Charnley (dalam

Fauzi & Zakiah, 2014). Dalam hal ini, kualitas pemberitaan dapat dilihat dari enam dimensi yang terdiri dari:

- a. *Accurate* (keakuratan): terdapat fakta-fakta yang mencakup narasumber, gelar, jabatan, gambar, serta atribusi sumber berita sebagai pendukung ketepatan berita (Wien, 2006, p. 9) dan wartawan harus teliti pada penulisan judul artikel dan isi beritanya agar menghindari ambiguitas dan ketidaksesuaian dalam penyajiannya (Firmanto, 2020 dalam Paramastri, 2020, p. 41).
- b. *Objective* (objektif): Berita ditulis secara faktual dan apa adanya, tidak mengandung opini jurnalis dalam mencampuri fakta yang terjadi di lapangan agar tulisan yang dihasilkan bersifat penting dan tidak menyesatkan (Wien, 2020, p. 9).
- c. *Balanced* (seimbang): terdapat tiga indikator di dalamnya, yang mencakup penyusunan berita yang mengandung sudut pandang dari berbagai narasumber (Wien, 2006, p. 9); kelengkapan berita yang mencakup 5W+1H; dan pemilihan berita yang mencakup nilai-nilai berita (Ishwara, 2011).
- d. *Concise and Clear* (jelas dan tidak ambigu): informasi yang dimuat tidak menimbulkan ambiguitas dan disajikan secara singkat, jelas, dan sederhana (Fauzi & Zakiah, 2014)
- e. *Recent* (aktual): isu yang diberitakan sedang tren dan dibicarakan masyarakat (Paramastri, 2020, p. 43).

Selain itu, Suwarno dan Suryawati (2019, p. 65) menyatakan bahwa pemilihan dan penggunaan narasumber dalam suatu berita merupakan faktor penting bagi tersusunnya suatu berita. Dihadirkannya narasumber-narasumber ini juga akan membuat masyarakat percaya terhadap pemberitaan yang disajikan media. Dalam hal ini, Suwarno dan Suryawati (2019) mengemukakan terdapat 12 narasumber dalam pemberitaan bencana, antara lain BMKG, Pemerintah daerah, Warga atau Korban, BNPB, Tim SAR, Pemerintah Pusat, Rumah Sakit, TNI, Polri, PMI, Basarnas, dan juga pihak lain. Selain itu, Irfa et al. (2018) juga mengklasifikasikan topik berita menjadi 12 buah, yakni ekonomi, gaya hidup, kesehatan, hiburan, hukum, olahraga, otomotif, pendidikan, politik, budaya, teknologi, dan wisata.

Dalam memberitakan bencana, media juga memiliki waktu tayang yang sangat berpengaruh dalam media *online*. Dalam hal ini, pemilihan waktu tayang yang sesuai dan tepat akan berpengaruh pula pada kecepatan informasi tersebut tersebar. Lestari et al. (2018, p. 112) menjabarkan terdapat tiga kategori waktu tayang dalam pemberitaan bencana, yakni pra bencana (sebelum terjadinya bencana), tanggap darurat bencana (hari saat terjadinya bencana), dan juga pasca bencana (hari-hari setelah terjadinya bencana).

Namun, dalam memberitakan soal isu kebencanaan, Gama (2009, pp. 16-17) menyederhanakan menjabarkan nilai berita yang umum diangkat dalam pemberitaan tentang bencana, antara lain:

- a. *Timeliness*: nilai berita yang mengedepankan nilai aktualitas, yang mana semua fakta yang diterbitkan harus baru dan belum diketahui khalayak (Wendratama, 2017, p. 45). Dalam pemberitaan tentang isu bencana, peristiwa yang diangkat adalah peristiwa yang sedang ramai dibicarakan dan diperdebatkan oleh khalayak (Gama, 2009, p. 13).
- b. *Proximity*: terdapat unsur kedekatan jarak yang mengacu pada lokasi keberadaan target khalayak media (Wendratama, 2017, p. 49).
- c. *Consequence*: dalam hal ini, pemberitaan bencana harus berfokus pada akibat dari rangkaian peristiwa yang terjadi dan akhirnya mempengaruhi banyak orang dari segi ekonomi, sosial, dan lainnya (Gama, 2009, p. 14).
- d. *Human interest*: adanya nilai yang memengaruhi reaksi emosional pembaca beritanya, seperti senang, terharu, bangga, simpati, prihatin, dan marah (Wendratama, 2017, p. 48). Biasanya, jurnalis berusaha memasukkan aspek emosional agar membuat ceritanya semakin menarik bagi khalayak.
- e. *Magnitude*: nilai berita yang berorientasi pada besarnya peristiwa yang terjadi. Biasanya pemberitaan ini akan menekankan pada jumlah orang yang terdampak, maupun orang-orang yang berpotensi terdampak juga (O'Neill & Harcup, 2009, p. 168 dalam Legowo, 2019, p. 34). Selain itu, nilai berita ini juga berkaitan dengan

peristiwa yang jarang terjadi sebelumnya sehingga terdapat unsur *unusualness* atau ketidak laziman (Gama, 2009, p. 16).

Nazaruddin (2007, p. 2) mengajukan prinsip-prinsip dalam pemberitaan bencana yang mencakup keempat fase manajemen bencana, antara lain:

- a. Prinsip akurasi: media bertanggungjawab untuk meluruskan dan menjelaskan informasi dan rumor yang beredar merupakan fakta atau bukan. Dengan begitu, media harus bisa memilah mana informasi yang akurat dan mana yang hanya rumor agar tidak meresahkan dan menakuti masyarakat.
- b. Prinsip humanisme: humanisme di sini lebih menekankan pada prinsip suara korban sehingga media berperan untuk bisa menyediakan sarana bagi semua pihak, untuk bisa berekspresi. Namun secara etis, jurnalis harus menghormati dan mengingat bahwa korban sedang dalam kondisi gawat darurat sehingga tidak bisa sembarang diwawancarai.
- c. Prinsip komitmen menuju rehabilitasi: peliputan yang dilakukan oleh media dalam fase pascabencana harus mempertimbangkan proses pemulihan korban. Media bertanggung jawab untuk bisa menyuguhkan solusi praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat di fase pascabencana agar masyarakat bisa pulih dan media juga

berperan sebagai sarana *lost and found* bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya.

- d. Prinsip kontrol dan advokasi: media berfungsi sebagai *watchdog* bagi pihak-pihak penyalur bantuan bencana agar bantuan yang ada tidak menumpuk dan bisa dibagikan secara merata dan menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan objek penelitian yang merupakan pemberitaan potensi gempa dan tsunami yang bisa terjadi di wilayah Selatan Jawa, artinya fase yang harus paling ditekankan adalah fase pra-bencana. Dalam hal ini, media harus menyediakan *early warning system* yang mencakup informasi dasar yang akurat, dan juga cara-cara penyelamatan diri dari bencana yang berpotensi akan terjadi di suatu wilayah (Nazaruddin, 2007, p. 2).

Intinya, dalam setiap peristiwa bencana, masyarakat pasti akan menggantungkan semua informasi pada media massa. Oleh karena itu, kekuasaan media massa atas informasi seharusnya bisa dimanfaatkan oleh media dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang bencana, selaras dengan peran dan fungsi media massa yang telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa media massa berperan sebagai sarana informasi dan edukasi.

### 2.2.2 *Agenda Setting*

*Agenda setting* merupakan sebuah proses media massa menyajikan isu-isu tertentu secara sering dan menonjol sehingga sebagian besar masyarakat mulai menganggap isu-isu tersebut lebih penting daripada yang lain (Coleman et al., 2009, p. 147). Pemikiran awal tentang *agenda setting* diprakarsai oleh Bernard Cohen (1963) dalam Baran & Davis (2010, p. 351) yang mengatakan bahwa media terkadang tidak terlalu sukses untuk membuat orang memikirkan apa yang seharusnya mereka pikirkan, dan tulisan inilah yang menjadi dasar tentang apa yang disebut sebagai teori *agenda setting* media massa. Sederhananya, semakin banyak liputan yang dilakukan terhadap suatu isu, maka semakin penting isu tersebut bagi orang-orang (Coleman et al., 2009, p. 148).

Sama halnya dengan Tamburaka (2013, p. 23) yang mendefinisikan *agenda setting* sebagai sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa sebuah media tidak mengatakan apapun yang orang pikirkan, tetapi sebaliknya, media akan mengatakan apa yang harus orang-orang pikir. Dalam hal ini Tamburaka juga merumuskan dua asumsi yang mendasari penelitian tentang *agenda setting*, antara lain:

1. Masyarakat dan media massa tidak mencerminkan kenyataan melainkan menyaring dan membentuk isu
2. Konsentrasi media massa hanya terfokus dalam beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.

Entman (2007 dalam Stomberg, 2012, p. 6) menyatakan bahwa *agenda setting* menjalankan fungsi pertama dari *framing* yakni mengidentifikasi masalah yang patut menjadi perhatian pemerintah dan publik. Hal ini selaras dengan pendapat dari Tamburaka (2012) yang mengungkapkan bahwa media akan mentransfer dua elemen dalam agenda publik, yakni kesadaran dan informasi dengan cara mengarahkan kesadaran dan perhatian publik terhadap isu-isu yang dinilai penting oleh media massa.

*Agenda setting* memiliki tiga tahapan (level) yang berkaitan, yakni agenda media yang menentukan prioritas media dalam meliput isu berita; agenda publik, yang mana dalam hal ini agenda media dapat memengaruhi pandangan publik; agenda kebijakan, yakni interaksi antara agenda publik dengan isu yang dianggap oleh pengambil kebijakan (Rogers & Dearing dalam Morissan, 2013, p. 498). Dalam sebagian besar diskusi tentang peran *agenda setting* media massa, konsep *agenda setting* yang kedua sangatlah umum, karena ini dikenal sebagai karakteristik atau properti yang menggambarkan tentang objek yang diberitakan (Stomberg, 2012, p. 6).

Konsep awal agenda media dilandasi dengan adanya asumsi bahwa media memiliki kemampuan memtransmisi suatu isu untuk memengaruhi agenda publik sehingga masyarakat akan menganggap isu tersebut penting karena media memberitakan isu tersebut secara terus menerus dan menganggap isu tersebut penting (McCombs & Shaw, 1968 dalam Putri et al., 2021, p. 101). Media memberikan perhatian yang berbeda dalam memberitakan setiap isu. Dalam hal ini, beberapa masalah yang muncul

kadang diberitakan dengan proporsi yang besar, tetapi ada pula media yang memberitakan isu yang sama dengan proporsi yang kecil. Sehingga, isu yang memiliki proporsi paling banyak disebut juga sebagai isu yang diatur dalam agenda media (Eriyanto, 2011, p. 196).

McCombs & Reynolds (2009 dalam Stomberg, 2012, p. 6) menjelaskan bahwa sorotan atribut objek dapat memengaruhi bagaimana audiens bereaksi ketika mereka memikirkan objek tersebut, dalam hal ini atribut objek akan menarik perhatian pada perspektif yang digunakan oleh media dan audiens mereka untuk menggambarkan topik dalam berita harian. Keputusan suatu media massa dalam mengulang-ulang atau tidak sebuah berita dapat membuat publik akhirnya dapat memutuskan apakah berita tersebut menjadi penting atau tidak (Eriyanto, 2011). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media tak hanya mampu menetapkan agenda untuk isu tertentu, tetapi juga dapat menyediakan objek-objek pemberitaan yang dianggap penting (Griffin, 2006, p. 401).

Di sisi lain, *agenda setting* berperan penting dalam memfokuskan perhatian orang pada masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh pemerintah dan lembaga publik. Tanpa kesepakatan tentang apa yang penting, masyarakat mungkin akan lebih sulit berjuang demi mencapai kebaikan publik (Coleman et al., 2009, p. 149). *Agenda setting* tingkat pertama hanya berfokus pada jumlah liputan media yang diterima suatu isu atau topik lain, sedangkan pada *agenda setting* tingkat kedua digunakan untuk melihat bagaimana media membahas isu-isu atau objek perhatian

lainnya (Coleman et al., 2009, pp. 150). Hal ini biasanya digunakan pada pemberitaan tentang politik atau pemilu, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk isu-isu non-pemilu, seperti isu-isu tentang lingkungan atau ekonomi.

Baran dan Davis (2010, p. 348 dalam Tamburaka, 2013, p. 37) merumuskan hipotesis untuk teori *agenda setting*, yakni “masalah-masalah yang mendapatkan perhatian besar dari berita nasional menjadi masalah yang dipandang publik sebagai penting juga,” sehingga dapat disimpulkan bahwa *agenda setting* sebagai suatu teori dapat diaplikasikan dan akan muncul ke permukaan ketika sebuah isu krusial dan penting menjadi diskusi nasional di tengah-tengah masyarakat.

Meski begitu, perlu diketahui bahwa *agenda setting* juga telah digunakan untuk memberitakan isu-isu lokal, bukan hanya isu-isu nasional (Palmgreen & Clarke, 1977; Smith, 1987 dalam Coleman et al., 2009, p. 149). Jurnalis cenderung menunjukkan seperangkat nilai berita dan sumber informasi yang sama, terutama ketika mereka bekerja di wilayah geografis dan/atau berita yang sama (Gans, 1979 dalam Valenzuela et al., 2017, p. 619). Di sinilah media massa berperan penting untuk mengatur agenda diskusi publik yang nantinya akan mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan dan memenuhi kepentingan publik atau permintaan akan solusi atau jawaban akan masalah yang sedang dihadapi, salah satunya yakni tentang isu kebencanaan (Barnes et al., 2008, p. 605).

Severin dan Tankard (dalam Kriyantono, 2012, p. 225) menyebutkan bahwa agenda media memiliki dimensi yang saling berkaitan, antara lain:

1. *Visibility* (visibilitas): jumlah dan tingkat penonjolan suatu isu dalam pemberitaan. McCombs dan Shaw (1972) menentukan dua konsep untuk menunjukkan seberapa panjang berita yang disajikan oleh sebuah media dengan mengukur jumlah katanya, dan juga penempatan isu tersebut dalam kanal tertentu. Griffin (2006, p. 372-374) mengungkapkan bahwa tingkat visibilitas dapat diukur dari kedua konsep tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Tamburaka (2013, p. 34) yang menyatakan bahwa nilai penting dari sebuah berita dapat diukur dari banyaknya jumlah artikel dan banyaknya liputan yang dilakukan oleh sebuah media terhadap isu tertentu. Selain itu, McCombs dan Shaw juga menyatakan bahwa *visibility* juga dapat diukur dengan melihat isu apa saja yang diberitakan (Shaw, 1972 dalam Chintya, 2020, pp. 19-20). Hal ini dilakukan agar nantinya dapat dilihat dan ditarik kesimpulan isu-isu apa saja yang paling disorot oleh media.

2. *Audience salience*: relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Dalam hal ini, media tidak memberitakan semua peristiwa, melainkan harus menilai terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk kriteria dari nilai berita. Eriyanto (2012, pp. 120-121)

menjelaskan dalam memberitakan sesuatu, media harus bertumpu pada ukuran-ukuran atau nilai-nilai tertentu yang layak dan bisa disebut sebagai berita.

Dalam mengukur tingkat *audience salience* dalam sebuah berita, Eriyanto (2012) mengatakan bahwa hal tersebut dapat diukur melalui nilai beritanya. Nilai berita atau *news value* merupakan sebuah acuan yang dapat digunakan oleh para pekerja media, khususnya jurnalis untuk memutuskan peristiwa ataupun fakta mana yang pantas untuk dijadikan berita. Terdapat sebelas nilai berita yang dirumuskan oleh Sumadiria (2005), yakni *unusualness, newness, impact, timeliness, proximity, information, conflict, prominent, surprising, human interest, dan sex*.

3. *Valence*: menyenangkan atau tidaknya cara media memberitakan suatu isu atau peristiwa. Terdapat tiga indikator dalam menentukan arah pemberitaan suatu peristiwa atau nada pemberitaan yang dilakukan oleh suatu media menurut Kriyantono (2012, pp. 246-247), antara lain:

- a. *Favourable* (positif): Nada pemberitaan positif atau sikap *favourable* sebuah media dalam memberitakan sesuatu dapat dilihat jika berita yang dihasilkan memuat pernyataan pendapat atau opini mendukung dengan memuji, menyanjung, dan menyetujui suatu isu tertentu secara eksplisit maupun implisit.

- b. Netral: nada pemberitaan yang netral adalah suatu sikap media dalam memberitakan sesuatu tanpa bersikap memihak terhadap suatu isu tertentu baik secara eksplisit maupun implisit.
- c. *Unfavourable* (negatif): nada pemberitaan negatif merupakan cara media memberitakan sesuatu dengan menampilkan pernyataan atau opini yang tidak mendukung dengan cara mencela, meremehkan, bahkan menolak suatu isu tertentu baik secara eksplisit ataupun implisit.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan ketiga dimensi tersebut sebagai alat ukur penelitian analisis isi ini. Media massa selalu memiliki kekuatan untuk mengarahkan khalayak kepada apa saja yang harus kita lakukan dari setiap pemberitaannya. Dimensi *visibility* untuk melihat isu apa yang ditonjolkan dalam suatu media, dimensi *audience salience* digunakan untuk melihat nilai-nilai berita apa saja yang diangkat dalam suatu pemberitaan, dan dimensi *valence* digunakan untuk melihat bagaimana nada pemberitaan yang dihasilkan oleh setiap media yang dianalisis. Dengan ketiga indikator tersebut, maka peneliti akan bisa melihat dan memetakan isu-isu yang mendapat perhatian media.

### 2.2.3 Peran Media Massa dalam Pemberitaan Bencana

Bungin (2006, p.7 dalam Santosa, 2017, p. 200) mengemukakan bahwa media massa merupakan salah satu sarana komunikasi dan informasi yang menyebarkan informasinya dilakukan secara massa dan dapat diakses masyarakat secara massal. Harold Lasswell (1948 dalam McQuail, 2010, p. 91) juga mendeskripsikan bahwa media massa berperan dalam menjawab pertanyaan ‘*Who says what to whom, through what channel and with what effect?*’ dalam studi komunikasi karena ini merupakan model komunikasi sekaligus merupakan sifat bentuk-bentuk komunikasi massa yang dominan.

Media massa seperti surat kabar, televisi, radio, serta media *online* memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya menguntungkan untuk komunikasi bencana karena menyediakan akses mudah ke publik dan merupakan sistem komunikasi yang kuat dalam kejadian kebencanaan ini. Selain itu, informasi yang dihasilkan oleh media massa juga ditransmisikan oleh para jurnalis yang tidak membentuk ‘saluran informasi’ pasif, melainkan bertindak sebagai *gatekeeper*, *interpreter*, dan komentator (Nair, 2010, pp. 36-38).

Peran dari media massa ini sebetulnya telah diatur pula dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjelaskan bahwa media massa berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol, serta lembaga ekonomi (Surbakti, 2015, p. 79). Selaras dengan hal tersebut, Widodo (1997 dalam Surbakti, 2015, pp. 80-81) menjabarkan lagi penjelasan dari kelima fungsi pers tersebut:

1. *To inform*: pers berperan dalam penyebaran informasi kepada khalayak melalui tulisan, siaran, dan tayangan yang diberikan secara rutin setiap harinya.
2. *To educate*: konten pemberitaan yang dihasilkan oleh media massa harus bisa memberikan edukasi atau mendidik khalayaknya.
3. *To controle*: dalam hal ini, media massa berperan untuk memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang ada dalam pemberitaannya. Saran dan kritikan yang media massa berikan harus bersifat membangun terutama dalam pengontrolan masyarakat dan pemerintah pemegang kekuasaan.
4. *To bridge*: dalam hal ini media berperan sebagai ‘jembatan’ yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Media massa bertugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak bisa disampaikan secara langsung pada pemerintah.
5. *To entertain*: konten-konten yang dihasilkan oleh media massa diharapkan dapat memberikan hiburan kepada khalayak, bukan hanya dari segi kelucuan, tetapi juga kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari kelima fungsi tersebut, jika dikaitkan dengan isu kebencanaan, media harus bisa berfokus pada fungsi yang keempat, yakni berperan sebagai ‘jembatan’ antara masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat

umum, satu-satunya sumber informasi yang terbesar adalah media massa. Oleh karena itu, media harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu bencana dan cara peliputannya, karena media terkadang tidak memiliki jawaban yang pasti atas pertanyaan publik tentang bencana yang terjadi (Dave, n.d., p. 2).

Media menjalin hubungan langsung antara publik dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam peristiwa kebencanaan dalam menyebarkan informasi yang penting kepada publik sebelum, selama, dan setelah bencana. Dalam mengelola komunikasi bencana kebutuhan informasi yang tepat pada waktu yang tepat tidak pernah berubah karena pada dasarnya orang pasti membutuhkan peringatan sebelum bencana, saat kejadian, dan setelah bencana; data tentang korban maupun kerusakan; dan juga bantuan yang tersedia saat setelah bencana terjadi (Dave, n.d., p. 1).

Jika dihubungkan dengan keempat fase manajemen bencana, dalam buku *Principles of Disaster Reporting Handbook* (2014, p. 23) telah diatur peran media dalam peliputan dan penulisan berita di setiap fase manajemen bencananya:

- a. Kesiapsiagaan (*Preparedness*): mengedukasi masyarakat tentang berbagai komponen kebencanaan, melaporkan inisiatif dan rencana dalam mengatasi kerentanan.
- b. Tanggapan (*Response*): dampak langsung pada daerah yang terkena bencana, memproyeksikan kebutuhan inti masyarakat dan memberitahu orang-orang yang terkena dampak tentang bagaimana

mereka dapat mengakses bantuan, serta memberitakan tentang respon pemerintah yang sedang berlangsung.

- c. Pemulihan (*Recovery*): pertanggungjawaban penggunaan bantuan, pelajaran yang bisa dipetik dari bencana yang terjadi, cerita-cerita sukses, praktik konstruksi berkelanjutan dan penggunaan material dalam pemulihan, serta pilihan mata pencaharian pascabencana
- d. Mitigasi (*Mitigation*): melaporkan dan memengaruhi agenda kebijakan dan pembangunan yang lebih besar, mengarusutamakan diskusi dan tindakan pemerintah dan LSM ke dalam topik-topik seperti air, konstruksi, ketahanan pangan, kesehatan, mata pencaharian, perubahan iklim, serta kesejahteraan perempuan dan anak.

Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa media memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang bencana, peringatan bahaya, dan mengumpulkan dan mengirimkan informasi tentang daerah yang terkena dampak, menyiagakan para pejabat pemerintah dan organisasi, dan juga memfasilitasi diskusi tentang kesiapsiagaan tanggap bencana (Dave, n.d., p. 2). Media juga dapat memainkan peran tidak hanya dalam peringatan dini dan pelaporan peristiwa bencana, tetapi sebagai sarana dalam menyebarkan kesadaran dan mengubah perilaku publik agar ketahanan masyarakat bisa dapat terbangun untuk jangka panjang (*Principles of Disaster Reporting: Guidelines*, 2014, p. 1).

Dari sudut pandang manajemen bencana, mobilisasi bantuan dari luar masyarakat yang terkena dampak (bahkan bantuan internasional) merupakan fungsi utama media massa yang melaporkan bencana terhadap khalayak yang tidak terkena dampak. Lebih jauh lagi, pelaporan bencana juga sebenarnya dapat membantu meningkatkan kesadaran akan isu penanggulangan bencana dalam agenda kebijakan pemerintah (Scheufele, 1999 dalam Nair, 2010, p. 37). Maka dari itu, media yang mengomunikasikan informasi terkait bencana kepada orang-orang dan otoritas terkait secara memadai dapat memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan meminimalkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda akibat bencana (Nair, 2010, p. 38).

Selama bencana berlangsung, media juga dapat memainkan peran dalam pemantauan dan memperingatkan orang yang terkena dampak atau yang akan terkena dampak tentang anjuran dan larangan, membangun kontak, mengidentifikasi tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, dan umumnya membantu pihak berwenang seperti LSM dan sukarelawan dalam menjangkau, menginformasikan, dan meyakinkan orang-orang yang terkena dampak dari bantuan dan tindakan yang diambil (Lebigot, 1999 dalam Nair, 2010, p. 37). Dalam hal ini media massa berperan penting untuk memperdalam dan meningkatkan moral masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mencegah kepanikan serta menjaga ketertiban masyarakat.

Konsep peran media massa dalam pemberitaan bencana digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat sejauh mana peran media yang telah diterapkan dalam pemberitaan potensi bencana gempa dan tsunami di wilayah Selatan Jawa pada media *online* lokal Banten selama periode tahun 2018-2021 dengan mengaitkan konsep peran media ini dengan konsep jurnalisme bencana dilihat dari prinsip pemberitaan bencana dan juga pihak narasumber yang digunakan dalam berita bencana di setiap media yang dianalisis.

#### **2.2.4 Bencana Gempa dan Tsunami**

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam ataupun faktor manusia sehingga berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis bagi orang-orang yang mengalaminya. Hal itu diatur dalam Pasal (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lalu, bencana dibagi ke dalam tiga jenis, yakni bencana geologi, hidrometeorologi, dan antropogenik (“Secara Umum Bencana Alam Dibagi Menjadi 3 Jenis”, 2017).

Melihat kondisi geografis Indonesia yang terletak di empat lempeng tektonik, atau dengan kata lain wilayah *seismic gaps* (McCann et al., 1979 dalam “Penelitian Oleh Tim Peneliti ITB: Gempa Berpotensi Tsunami Di

Selatan Jawa”, 2020, para. 1), ternyata Indonesia juga berada pada rangkaian Cincin Api yang mana wilayah ini disebut-sebut sebagai lempeng tektonik paling aktif di dunia sehingga paling rentan dilanda bencana geologi, yakni gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor, dan letusan gunung berapi (BNPB, 2014, pp. 17-18 dalam Legowo, 2019, p. 27). Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada dua bencana geologi saja, yakni gempa dan tsunami.

Nur (2010, p. 67) menjelaskan bahwa gempa merupakan peristiwa terjadinya getaran asli dari dalam bumi, yang merambat ke permukaan bumi akibat lempeng bumi yang pecah dan bergeser dengan keras. Lalu, pengertian tsunami adalah peristiwa perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan pada permukaan laut secara tiba-tiba dan terjadi karena adanya gempa bumi, longsor, atau bahkan hantaman meteor yang ada di bawah laut (Basarnas, 2011 dalam Aspen, 2017, p. 6).

Berdasarkan letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *seismic gaps*, yakni wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun, maka Indonesia berpotensi mengalami gempa besar yang akan terjadi pada periode berikutnya, yakni pada tahun dan era sekarang (McCann et al., 1979 dalam “Penelitian Oleh Tim Peneliti ITB: Gempa Berpotensi Tsunami Di Selatan Jawa”, 2020, para. 1).

Namun, sejak munculnya kajian tentang potensi gempa dengan magnitudo 8,7 diikuti tsunami setinggi 29 meter di sepanjang pesisir selatan

Jawa karena wilayah inilah yang berulang kali diguncang gempa dan memicu terjadinya tsunami (“Penelitian Oleh Tim Peneliti ITB : Gempa Berpotensi Tsunami Di Selatan Jawa”, 2020, paras. 8-9), banyak sekali pemberitaan di media, khususnya media *online* dengan narasi negatif dan membuat kecemasan serta kepanikan masyarakat (Thirafi, 2021, para. 1).

Menurut Kepala Laboratorium Geodesi Insititut Teknologi Bandung (ITB), wilayah-wilayah di Selatan Jawa yang berpotensi terkena dampak gempa *megathrust* dan tsunami meliputi Selat Sunda, Pelabuhan Ratu, selatan Pantai Parangtritis, dan juga selatan Pantai Jawa Timur. Hal tersebut dilihat berdasarkan data dari Global Navigation Satellite System (GNSS) dan dari hasil pemodelannya terlihat bahwa gempa tersebut berpotensi memiliki kekuatan mencapai magnitudo 8,7 hingga 9,0 yang mana efeknya dapat berdampak pada wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya (Bestari, 2021, paras. 1-2). Selain itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mencatat bahwa terdapat 25 wilayah di pulau Jawa yang rawan terkena bencana gempa bumi dan tsunami, yang mana keseluruhan wilayah tersebut tercantum dalam Katalog Gempa Bumi Merusak sepanjang tahun 1612 hingga 2014, di antaranya 4 wilayah di Banten, 5 wilayah di Jawa Barat, 9 wilayah di Jawa Timur, 4 wilayah di Jawa Tengah, dan 3 wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Supatoyo et al. dalam Fatimah, 2020, paras. 1-3). Berdasarkan data BMKG mengenai wilayah *seismic gap*, distribusi *B-value*, dan zona aktif gempa per Januari 2021, wilayah Selat Sunda dan Banten termasuk daerah yang patut diwaspadai

karena termasuk pula dalam zona *megathrust* yang rawan gempa dan juga rawan tsunami (tsunamigenik) (Daryono, 2021 dalam Sari et al., 2021).

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan lebih berfokus pada wilayah Banten karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti historis terkait bencana gempa bumi di wilayah Banten dan Jakarta yang bermula pada tahun 1699 (Dania & Raditya, 2019, paras. 7-8; Ucu, 2019, para. 1). Dania & Raditya (2019) mengutip sebuah penelitian yang terdapat dalam jurnal *Geoscience Australia* dan berjudul “*Indonesia’s Historical Earthquakes*” (2015), menjabarkan bahwa gempa bumi yang terjadi pada saat itu merupakan gempa bumi bersejarah pada abad ke-17 dan merupakan bencana yang berdampak paling signifikan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Reid (2012 dalam Dania & Raditya, 2019) yang mengemukakan bahwa guncangan yang terjadi saat itu memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan gempa bumi yang pernah terjadi sebelumnya.

Jika dilihat dari bukti historis kebencanaan gempa dan tsunami di wilayah Banten, terdapat tsunami besar di Selat Sunda yang dipicu oleh letusan Gunung api Krakatau pada tahun 1883 yang mengakibatkan hilangnya nyawa lebih dari 35 ribu jiwa, dan kerusakan infrastruktur (Self & Rampino, 1981; Simkin & Fiske, 1983; Sigurdsson et al., 1991 dalam Solihuddin et al., 2020, p. 16). Lalu, pada tahun 1928, terdapat tsunami kecil yang terjadi di sekitar Gunung api Anak Krakatau karena aktivitas vulkanik (Yudhicara & Budiono, 2008 dalam Solihuddin et al., 2020, p. 16). Meski

kebanyakan gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Banten diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik, Selat Sunda juga berpotensi tsunami yang terjadi dikarenakan proses tektonik pada zona subduksi atau *megathrust* seperti tsunami yang terjadi di Aceh 2005, Mentawai 2005, dan Pangandaran di tahun 2006 (de Langeet et al, 2001; Maeno & Imamura, 2007 dalam Solihuddin et al., 2020, p. 16).

Selain kejadian-kejadian tersebut, wilayah Banten juga baru saja mengalami peristiwa bencana gempa dan tsunami beberapa tahun silam, tepatnya pada 2018, yakni di bulan Januari dan Desember di wilayah Selat Sunda yang disebabkan oleh runtuh material Gunung api Anak Krakatau. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak korban jiwa lebih dari 430 orang dan merusak infrastruktur, terutama pada wilayah Kabupaten Pandeglang yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda (Solihuddin et al., 2020, p. 53). Lalu, setahun setelahnya Banten kembali dilanda gempa tepat pada 2 Agustus 2019 yang berpusat di wilayah Sumur, Kabupaten Pandeglang karena adanya deformasi batuan di dalam Lempeng Indo-Australia (Ali, 2019, para. 3). BMKG juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi sebanyak 840 gempa bumi tektonik di wilayah Banten dan hal ini meningkat sekitar 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Ridho, 2021, paras. 1-2). Tahun ini, tepatnya pada 2021, Banten juga masih mengalami hal yang sama meski tidak bermagnitudo besar seperti tahun-tahun sebelumnya, terutama di wilayah pesisir Selat Sunda, tepatnya di Kabupaten

Pandeglang, Banten karena diakibatkan oleh adanya sesar aktif di dasar laut (Saptoyo, 2021, para. 8).

Dari bukti historis yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya terkait rentetan bencana gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Banten, dapat disimpulkan bahwa Banten merupakan wilayah yang rawan bencana dikarenakan letak geografisnya yang berada di sebelah selatan Samudera Hindia, sebelah barat Selat Sunda, dan juga di sebelah utara Laut Jawa. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian terkait pemetaan multirawan bencana di Provinsi Banten yang dilakukan oleh Soleman et al. (2012), Provinsi Banten merupakan wilayah yang multirawan bencana, dan di dalamnya terdapat potensi rawan bencana gempa dan tsunami. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Dr. Eko Yulianto, selaku peneliti dari LIPI (dalam Ucu, 2019, para. 7) yang menemukan bukti-bukti bahwa tsunami pernah menerjang di pantai Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam hal ini, Banten memiliki wilayah rawan gempa seluas 344.126,59 hektare dan sebesar 55,45 persen dari total wilayah Provinsi Banten, yakni 518,361 hektare merupakan wilayah yang mengalami kondisi multirawan bencana (Soleman et al., 2012, pp. 56-58) dikarenakan kondisi di Selat Sunda yang terdapat adanya lempeng-lempeng mikro Sunda dan struktur seismogenik yang memicu maupun telah menyebabkan terjadinya gempa (Soleman et al., 2012, p. 53) khususnya di daerah Kabupaten Serang, Pulau Panaitan, Tanjung Alang-alang, Tanjung Kait, dan juga Kabupaten

Pandeglang. Selain rawan gempa tektonik, wilayah tersebut juga rawan gempa vulkanik karena adanya Gunung Anak Krakatau yang masih aktif dan menjadi ancaman serius bagi pesisir barat Banten, dan juga keberadaan *stratovolcano* Pulosari yang terdapat di Kabupaten Pandeglang yang perlu diwaspadai. (Soleman et al., 2012, pp. 53-54).

Hal itulah yang akhirnya membawa peneliti untuk akhirnya memilih pemberitaan terkait bencana gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Banten untuk diteliti dalam penelitian ini.

#### **2.2.5 Media Online Lokal**

Romli (2018, p. 22) menjelaskan bahwa saat ini khalayak tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti koran, televisi, ataupun radio dalam mengikuti perkembangan dunia seiring dengan perkembangan pengguna internet yang akan terus bertambah setiap tahunnya seiring berkembangnya pula teknologi. Media *online* memungkinkan khalayaknya untuk bisa berkomunikasi antarpembaca dan juga dengan pihak media, karena tersedia kolom komentar yang bisa dimanfaatkan oleh khalayak untuk memberi tanggapan terhadap suatu isu atau pemberitaan yang disampaikan oleh media.

Terdapat beberapa karakteristik media *online* yang dikemukakan oleh Romli (2018, p.37), antara lain:

1. Multimedia: memungkinkan media untuk bisa menyajikan berita dengan format teks dan audiovisual secara bersamaan.

2. Aktualitas: berisi info yang bersifat aktual karena kemudahan dalam penyajian
3. *Update*: dari sisi konten maupun redaksional, pembetulan informasi dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya jika ada kesalahan ketik atau ejaan, atau bahkan kesalahan informasi yang menyebabkan adanya misinformasi ataupun disinformasi.
4. Kapasitas luas: dapat memuat naskah berita yang sangat panjang (*long-form*), dan juga dapat dijangkau oleh semua orang yang sama-sama terhubung dalam jaringan internet.
5. Fleksibel: proses pemuatan dan penyuntingan naskah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, begitu pula dengan jadwal terbit yang bisa dilakukan setiap saat.

Dalam hal ini, media *online* dituntut untuk aktual, cepat, *update*, dapat mencakup kapasitas khalayak yang luas, dan fleksibel serta dapat terjangkau di daerah manapun dan bisa diakses kapanpun (Romli, 2014 dalam Prabowo, 2020, p. 18).

Seiring dengan perkembangan media *online*, akhirnya banyak pula media *online* lokal yang berkembang di seluruh daerah di Indonesia. Dalam hal ini Siregar (2002 dalam Sandjadirdja, 2018, p. 27) membagi media massa ke dalam tiga ruang lingkup, yakni nasional, regional, dan lokal. Nasional artinya mencakup keseluruhan wilayah dalam suatu negara; regional berarti sebagian wilayah dari suatu negara; dan lokal artinya terbatas hanya di satu wilayah atau satu kota saja. Media massa lokal

didefinisikan sebagai media yang memiliki pemberitaan yang isinya menyesuaikan dengan kebutuhan khalayak dalam basis wilayahnya. Dalam konteks media lokal, ruang lingkup pemberitaan tak hanya terbatas pada skala ruang secara fisik, tetapi orientasi pemberitaan informasinya juga terbatas terhadap satu wilayah saja (Noveri dalam Sandjadirdja, 2018, p. 27).

Sandjadirdja (2018, p. 28) mengemukakan bahwa ada 5 karakteristik media massa lokal, antara lain:

1. Pihak pengelola media merupakan masyarakat setempat
2. Isi pemberitaannya mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat
3. Mengangkat topik berita mengenai beragam peristiwa, kegiatan, masalah, dan tokoh-tokoh pelaku masyarakat setempat
4. Khalayaknya berada pada satu wilayah yang sama dengan basis pengelolaan medianya dan terdiri dari lapisan masyarakat yang kurang variatif secara struktur dan strata sosial.
5. Orientasi pemberitaannya lebih dominan tentang pemberitaan yang terbatas pada wilayahnya.

Wendratama (2017, p. 188) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, media *online* lokal cukup berkembang dan merupakan peluang yang bagus bagi media *online* karena kondisi ini mencerminkan semangat lokal dari setiap daerah. Hal ini dikarenakan khalayak lokal masih belum mendapatkan layanan berita daring yang memadai, terutama di tingkat kota.

Realitanya, pemberitaan di media nasional terus-terusan meliput peristiwa yang hanya terjadi di kota metropolitan dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Padahal nyatanya, Indonesia terdiri dari banyak daerah dan masyarakatnya berasal dari berbagai daerah yang berbeda pula. Tiap kota pasti memiliki gaya hidup yang berbeda dan hal inilah yang merupakan sumber sekaligus target bagi media lokal dalam memberitakan isu-isu lokalnya (Wendratama, 2017, p. 189).

Namun, media lokal masih memiliki kelemahan jika dibanding media nasional. Media lokal saat ini telah hadir dengan tujuan sebagai pengganti surat kabar cetak yang sudah meredup terutama dalam lingkup regional, tetapi pembuatan konten-konten beritanya masih menggunakan pola pikir cetak. Hal inilah yang mengakibatkan tingkat konsumsi media *online* lokal masih rendah karena tidak menjawab kebutuhan khalayak akan berita yang sesuai dengan karakteristik media *online* (Wendratama, 2017, p. 188).

Jika dikaitkan dengan nilai berita, pemberitaan di media daring harus mengedepankan nilai *proximity* (kedekatan jarak), yang mana media lokal pastinya akan menyajikan peristiwa-peristiwa yang lebih memiliki nilai kedekatan dibanding media lainnya di luar wilayah tersebut (Wendratama, 2017, p. 49). Warga membutuhkan berita yang ada hubungannya dengan agenda masyarakat dan kejadian yang ‘dekat’ dengan mereka. Bagi media daring lokal, yang tentu saja bekerja untuk masyarakat lokalnya dan berada di wilayah yang relatif tidak luas, unsur kedekatan dengan berbagai

kelompok masyarakat sudah menjadi suatu keharusan, termasuk peka terhadap perubahan demografi dan kebiasaan warga serta kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah tersebut (Wendratama, 2017, pp. 189-190).

Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah pemberitaan tentang potensi gempa dan tsunami yang terjadi di wilayah Selatan Jawa pada media-media *online* lokal Banten. Maka dari itu, konsep media *online* lokal ini relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian tentang media lokal yang akan peneliti lakukan.

### **2.3 Alur Penelitian**

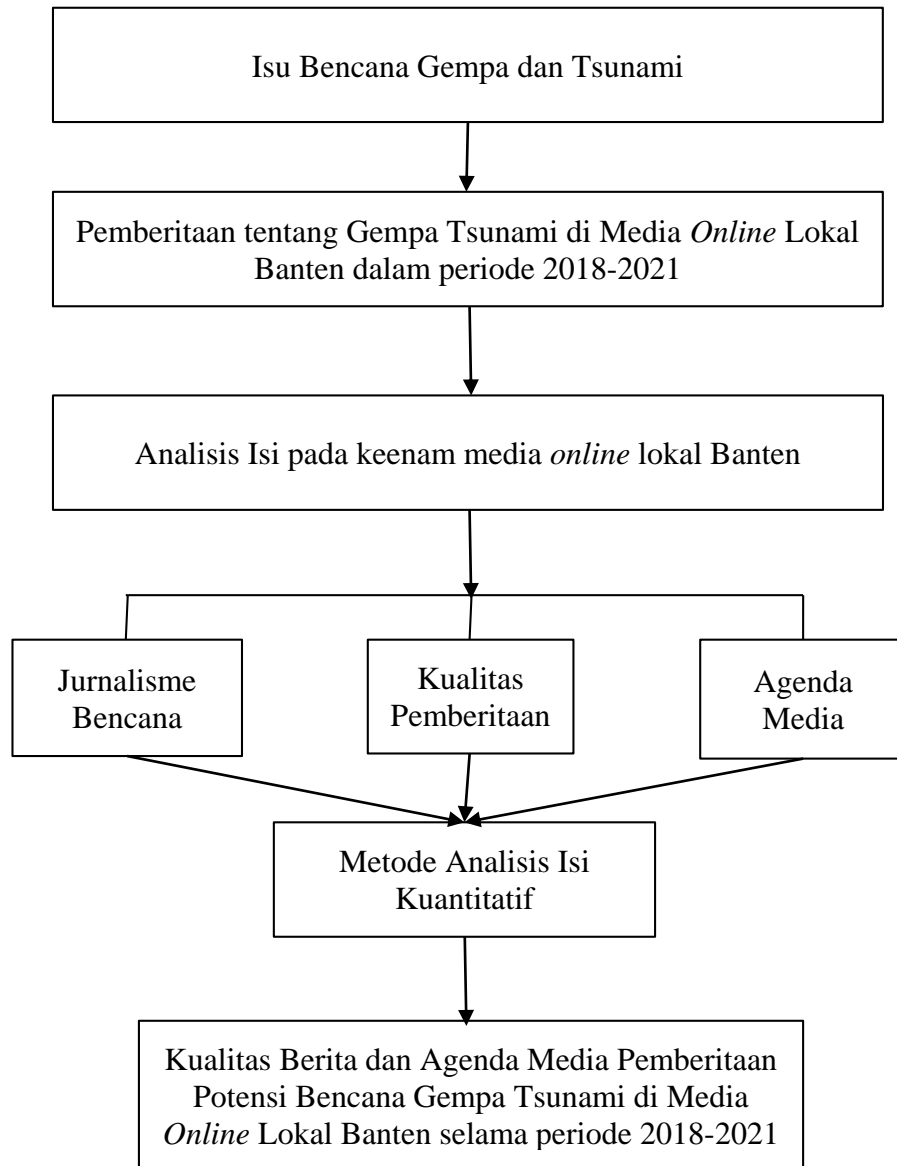
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan pemberitaan, memberikan perspektif dan peran media, dan menjelaskan kualitas serta kecenderungan agenda media dalam pemberitaan tentang isu bencana gempa dan tsunami pada media *online* lokal Banten selama tahun 2018-2021, yang daerahnya disebut-sebut berpotensi terdampak gempa *megathrust* tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode analisis isi dan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Langkah pertama yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah memilih media *online* lokal Banten yang terdaftar di Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), sekaligus yang sudah terverifikasi dan dinilai faktual oleh Dewan Pers. Terdapat 5 media lokal yang peneliti pilih untuk diteliti, antara lain *diksinews.co.id*, *indopolitika.com*, *palapanews.com*, *rmolbanten.com*, dan *vinus.id*. Kemudian, peneliti akan mengumpulkan berita-berita tersebut untuk dijadikan sebagai populasi penelitian.

Selanjutnya, peneliti akan memilih beritanya sesuai dengan jumlah sampel, dan mengamati apakah isi dari pemberitaan tersebut telah sesuai dengan aspek jurnalisme bencana atau belum, sehingga peneliti bisa melihat tingkat penerapan jurnalisme bencana dalam pemberitaan tentang potensi gempa dan tsunami di Selatan Jawa dari kelima media *online* lokal Banten tersebut.

Alur penelitian yang akan peneliti lakukan dapat dilihat pada Bagan 2.2.

Bagan 2.2 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2021